

EKSPLORASI KOMUNIKASI ANTARORGANISASI DALAM RESOURCE SHARING SATGAS PPKPT PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN

Indah Kusuma Astuti¹, Choyrull Ariefin², Bagus Dwi Bramantyo³
AKMRTV Jakarta^{1,2,3}

indhkusuma7@gmail.com¹, choyrul.arifin@gmail.com², bagusdwibramm@gmail.com³

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan kampus menjadi isu mendesak di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi yang dituntut untuk memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan yang lebih kuat. Ketidacukupan kapasitas kelembagaan mendorong perlunya kolaborasi antar universitas melalui praktik *resource sharing*. Penelitian untuk mengkaji bagaimana komunikasi antar organisasi mendukung keberhasilan *resource sharing* dalam Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), dengan studi ini bertujuan kasus di AKMRTV Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen kelembagaan. Analisis dilakukan dengan menyoroti praktik berbagi tenaga ahli, pertukaran informasi, penyelarasan standar operasional prosedur (SOP), dan pemanfaatan fasilitas pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *resource sharing* mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan kualitas pendampingan korban. Komunikasi internal berperan menjaga koordinasi dan konsistensi, sementara komunikasi eksternal memperkuat jejaring kerja sama antar perguruan tinggi. Kepercayaan dan prinsip timbal balik menjadi fondasi keberlanjutan kerja sama, meskipun tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan hambatan komunikasi masih dihadapi. Dukungan kelembagaan serta ikatan sosial yang kuat terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi.

Kata Kunci: Kolaborasi Kelembagaan, Komunikasi Antar Organisasi, Kekerasan di Perguruan Tinggi, *Resource Sharing*, Satgas PPKPT

PENDAHULUAN

Komunikasi organisasi merupakan fondasi penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar organisasi sering menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan, birokrasi, dan keterbatasan komitmen, sehingga diperlukan komunikasi yang konsisten dan terbuka untuk menjaga efektivitas kerja sama. Ansell & Gash (2018) juga menekankan bahwa komunikasi antar organisasi merupakan inti dari keberhasilan platform kolaborasi, karena mampu mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan antar pihak. Dalam konteks kelembagaan pendidikan

tinggi, komunikasi organisasi menjadi instrumen strategis untuk memastikan koordinasi lintas unit berjalan efektif.

Salah satu bentuk kolaborasi yang relevan adalah *resource sharing*, yaitu praktik berbagi tenaga ahli, informasi, fasilitas, dan keahlian antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Olubiyo & Olubiyo (2023), resource sharing merupakan bentuk kolaborasi antarlembaga yang mendukung peningkatan kapasitas, mempercepat penanganan kasus, serta memperkuat mekanisme pendampingan. Penelitian akademik di Indonesia juga menegaskan efektivitasnya. Sugianti (2023) menemukan bahwa berbagi koleksi dan tenaga pustakawan antar universitas di FPPTI Jawa Barat mampu meningkatkan kualitas layanan pemustaka serta memperluas akses informasi akademik. Kajian bibliometrik oleh Andini & Salim (2024) mengungkap tren meningkatnya praktik knowledge sharing di sektor publik Indonesia, terutama dalam berbagi data dan tenaga ahli antar lembaga pemerintah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa resource sharing bukan hanya strategi efisiensi, tetapi juga fondasi penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan.

Dalam konteks Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), tenaga ahli yang dibagikan melalui *resource sharing* bukan sekadar individu, melainkan aktor kunci dengan kompetensi profesional yang diperlukan dalam penanganan kekerasan secara efektif dan humanis. Veronica (2019) menegaskan bahwa tenaga kerja profesional merupakan salah satu bentuk sumber daya yang dibagikan antar lembaga untuk memastikan layanan berjalan efektif. Pendekatan ini menandai pentingnya aspek profesionalisme dan sensitivitas dalam berbagi sumber daya, yang melampaui sekadar pertukaran data menuju koordinasi nyata dalam tindakan dan pendampingan korban berkelanjutan (Pratiwi, 2018).

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan meningkatnya kasus kekerasan di kampus. Data Al-Fajri (2024) mencatat bahwa pada tahun 2019 tercatat sekitar 1.298 kasus, dan jumlah ini meningkat menjadi 2.244 kasus pada tahun 2023. Laporan KemenPPPA (2025) juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan sering kali adalah individu dekat korban, sehingga proses pelaporan menghadapi hambatan psikologis dan sosial. Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme kelembagaan yang lebih kuat. Pemerintah telah merespons melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, yang memperluas mandat Satgas PPKPT untuk menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Namun penelitian menegaskan bahwa implementasi Satgas masih menghadapi tantangan berupa pemahaman urgensi pembentukan, kompetensi anggota, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada praktik *resource sharing* antara Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia, yang

telah menjalin kerja sama resmi dan berkelanjutan dalam penanganan kasus kekerasan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana praktik *resource sharing* diterapkan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi, serta bagaimana komunikasi antar organisasi berkontribusi melalui penyelarasan prosedur, pertukaran informasi, dan koordinasi peran. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan praktik *resource sharing* dan menilai kontribusi komunikasi antar organisasi dalam mendukung efektivitas penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Novelty penelitian ini terletak pada penerapan konsep *resource sharing* dalam konteks Satgas PPKPT, dengan fokus pada komunikasi antar organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan kolaborasi kelembagaan dalam penanganan isu sosial kampus. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi penguatan Satgas, tetapi juga memperluas kajian akademik tentang komunikasi organisasi dalam konteks penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk menciptakan pemahaman bersama, yang dapat dijelaskan melalui model Harold D. Lasswell dengan rumusan “Who says what in which channel to whom with what effect.” Model ini menekankan lima unsur utama: komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Perspektif Lasswell membantu memetakan komunikasi secara sistematis, mulai dari siapa yang menyampaikan, bagaimana pesan dirancang, melalui saluran apa disampaikan, kepada siapa ditujukan, hingga dampak yang dihasilkan. Model ini relevan untuk menilai efektivitas komunikasi dalam berbagai konteks, terutama organisasi dan kolaborasi antar Lembaga. Dalam konteks organisasi seperti Satgas PPKPT, model Lasswell dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses penyampaian informasi berlangsung dalam struktur formal dan informal.

Komunikasi antar Kelompok

Komunikasi antar kelompok dipahami sebagai proses pertukaran pesan dan makna yang berlangsung antara dua atau lebih kelompok sosial, yang bertujuan untuk membangun hubungan, memperkuat identitas, serta mengatasi perbedaan kepentingan. Komunikasi antar kelompok berperan penting dalam menciptakan kerja sama dan mengurangi konflik melalui interaksi yang konstruktif. Sementara itu, Forsyth (2010) menekankan bahwa dinamika kelompok memengaruhi pola komunikasi, termasuk kepemimpinan, norma, dan kohesi kelompok.

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antar kelompok dianggap sebagai cara penting yang memungkinkan Satgas PPKPT di berbagai universitas, seperti AKMRTV

Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia, untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam praktik berbagi sumber daya. Melalui komunikasi yang terorganisir, tim dapat berbagi para ahli, menyusun prosedur operasional bersama, serta saling bertukar pengalaman terbaik dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, komunikasi antar kelompok menjadi basis strategis yang memastikan kerja sama antar universitas berjalan dengan baik, memperkuat kemampuan tim, dan membantu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penyampaian, penciptaan, dan pertukaran makna dalam interaksi formal maupun informal di dalam organisasi, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas, membangun hubungan, serta mendukung pencapaian tujuan bersama (Ritonga, 2023). Dalam konteks berbagi sumber daya pada Satgas PPKPT, komunikasi organisasi dianggap sebagai alat utama yang memungkinkan terjadinya pertukaran keahlian, informasi, fasilitas, dan kemampuan secara efisien. Komunikasi tidak hanya berperan sebagai saluran teknis, tetapi juga sebagai alat untuk membangun koordinasi, menyelaraskan pandangan, serta memperkuat kepercayaan antar individu maupun antar lembaga. Dengan adanya komunikasi yang teratur dan terbuka, praktik berbagi sumber daya dapat berlangsung dengan dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi.

Kolaborasi antar Organisasi

Kolaborasi antar organisasi dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian. Menurut Pfeffer dan Salancik dalam “Teori Organisasi” karya Ilham & Suhendra (2022), organisasi tidak dapat hidup secara mandiri karena selalu bergantung pada lingkungan eksternal, sehingga kolaborasi menjadi mekanisme penting untuk memperoleh dukungan dan legitimasi. Selanjutnya, Huxham dalam “Teori Organisasi” karya Ilham & Suhendra (2022) menekankan bahwa kolaborasi antar organisasi merupakan proses membangun hubungan yang saling menguntungkan, meskipun seringkali penuh dengan tantangan koordinasi dan perbedaan kepentingan.

Selain itu mengidentifikasi empat dimensi utama komunikasi dalam kolaborasi, yaitu communication willingness (kesiapan berkoordinasi), communication commitment (konsistensi komunikasi), communication behaviors (bentuk dan media komunikasi), serta communication quality (ketepatan dan relevansi informasi). Studi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi sering terkendala oleh rendahnya komitmen, jaranganya koordinasi, dan hambatan struktural, sehingga kualitas komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi.

Resource Sharing

Resource sharing merupakan konsep kolaborasi antar institusi yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara bersama guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan. menjelaskan bahwa *resource sharing* awalnya berkembang dalam konteks kerja sama perpustakaan, khususnya dalam pemanfaatan koleksi, informasi, dan tenaga profesional melalui mekanisme kolaboratif. Namun, dalam perkembangannya, konsep *resource sharing* mengalami perluasan makna dan diterapkan dalam berbagai konteks organisasi, termasuk dalam kerja sama lintas institusi pendidikan.

Veronica (2019) menegaskan bahwa *resource sharing* atau silang layan merupakan kegiatan berbagi sumber daya yang dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama, baik formal maupun informal, antar lembaga. Bentuk kerja sama ini mencakup berbagi koleksi, data, fasilitas, tenaga kerja, maupun layanan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna serta mengurangi biaya pengembangan koleksi. Dengan kata lain, *resource sharing* tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial dan relasional yang dibangun melalui kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama. Dalam penelitian ini, *resource sharing* dipahami sebagai proses kerja sama antar Satgas PPKPT yang melibatkan pertukaran tenaga ahli, informasi, pengalaman penanganan kasus, fasilitas pendukung, serta pola komunikasi kelembagaan. *Resource sharing* tidak hanya dipandang sebagai strategi teknis berbagi sumber daya, tetapi juga sebagai kerangka konseptual kolaborasi sosial dan kelembagaan yang menjadi dasar analisis penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi.

Dengan demikian, *resource sharing* dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka konseptual kolaborasi sosial dan kelembagaan yang menjadi pijakan utama dalam menjelaskan praktik kerja sama lintas kampus Satgas PPKPT secara sistematis dan berkelanjutan.

SATGAS PPKPT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Satgas PPKPT dibentuk berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang menggantikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Satgas terdiri dari dosen, staf administrasi, dan mahasiswa terpilih yang telah mengikuti pelatihan khusus, dengan tugas menyusun pedoman pencegahan, menangani laporan kekerasan, berkoordinasi dengan layanan psikologi maupun hukum, serta melaporkan hasil kerja kepada pimpinan universitas. Penanganan kasus dilakukan melalui alur sistematis: pelaporan resmi (termasuk melalui LLDIKTI Wilayah III), pemeriksaan awal oleh Satgas berupa verifikasi dan pengumpulan bukti, hingga rekomendasi tindak lanjut atau sanksi sesuai ketentuan hukum dan kebijakan kampus. Tahap akhir menekankan pendampingan korban melalui perlindungan identitas, dukungan psikologis, sosial, dan akademik. Namun, praktiknya sering terkendala keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, serta hambatan koordinasi, sehingga strategi *resource sharing* antar-Satgas melalui berbagi

tenaga ahli, pelatihan bersama, SOP seragam, dan pertukaran praktik terbaik menjadi penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi.

Social Exchange Theory

Social Exchange Theory (SET) merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan sosial terbentuk dan berkembang melalui proses pertukaran sosial yang melibatkan perhitungan rasional antara keuntungan (*rewards*) dan kerugian (*costs*). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John W. Thibaut dan Harold H. Kelley dalam karya klasik mereka *The Social Psychology of Groups* yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam kajian hubungan sosial dan interdependensi (Thibaut & Kelley, 2017). SET menekankan bahwa keberlangsungan hubungan ditentukan oleh beberapa konsep utama, seperti *reward vs cost*, *comparison level*, *comparison level for alternatives*, timbal balik (*reciprocity*), dan kepercayaan (*trust*). Teori ini bersifat dinamis dan berkelanjutan, di mana keadilan serta *reciprocity* menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan interaksi.

Dalam konteks organisasi dan kelembagaan, SET tidak hanya menjelaskan hubungan antarindividu, tetapi juga kolaborasi antarkelompok dan institusi, sehingga relevan untuk memahami kerja sama, keterlibatan aktor, dan pencapaian tujuan bersama. Berbagi sumber daya baik informasi, tenaga ahli, fasilitas, jaringan sosial, maupun legitimasi kelembagaan dipandang sebagai bagian dari proses pertukaran sosial yang kompleks, bukan sekadar tindakan altruistik. Keputusan berbagi dipengaruhi oleh kalkulasi rasional, persepsi manfaat, risiko, serta pengalaman interaksi sebelumnya. Informasi menjadi sumber daya utama yang dipertukarkan, di mana perilaku berbagi informasi memperkuat kepercayaan dan membuka akses ke manfaat lain. Demikian pula, tenaga ahli, fasilitas, dan dukungan kelembagaan memperkuat legitimasi serta efektivitas kerja sama. Dalam konteks Satgas PPKPT, *resource sharing* dapat dipahami sebagai mekanisme pertukaran sosial yang memperkuat hubungan antar-Satgas, meningkatkan kapasitas penanganan kasus kekerasan, dan memastikan keberlanjutan kerja sama yang berperspektif korban di lingkungan perguruan tinggi.

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis studi kasus untuk menggali praktik *resource sharing* antar Satgas PPKPT dalam penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi. Penelitian dilakukan secara naturalistik dengan peneliti sebagai instrumen utama sehingga seluruh proses pengumpulan data berorientasi pada konteks nyata di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, serta korban yang mendapatkan pendampingan, observasi partisipatif terhadap kegiatan koordinasi, rapat, pelatihan, dan pendampingan korban, serta analisis

dokumentasi berupa laporan kasus, SOP Satgas, notulensi rapat, dan kebijakan kelembagaan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik kolaborasi dan penanganan kasus kekerasan dengan fokus pada kedalaman data yang relevan dan kaya informasi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung terus menerus sejak awal pengumpulan data dengan verifikasi melalui triangulasi sumber, teori, dan metode. Social Exchange Theory digunakan sebagai kerangka utama yang dipadukan dengan konsep komunikasi organisasi dan kerja sama antar lembaga sehingga praktik *resource sharing* dipahami tidak hanya sebagai pertukaran manfaat dan biaya tetapi juga sebagai proses komunikasi, koordinasi, dan pembangunan kepercayaan antar institusi.

HASIL DAN DISKUSI

Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta



Gambar 1: Logo Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta

Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta berdiri pada tahun 2023 sebagai implementasi kebijakan kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi, berlandaskan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta diperkuat dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang mencakup kekerasan secara umum. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Humas, Koresponden, Dokumentasi, dan Spesialis Media Sosial. Laporan kasus diterima melalui saluran resmi LLDIKTI, diverifikasi, lalu ditindaklanjuti dengan layanan konseling individu maupun kelompok, pendampingan akademik, serta konsultasi hukum melalui kerja sama dengan UKI. Rekomendasi kebijakan berupa sanksi, pendampingan, dan strategi pencegahan disampaikan kepada pimpinan universitas. Strategi komunikasi Satgas menekankan transparansi, dukungan bagi korban, dan koordinasi internal, namun keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi menunjukkan perlunya dukungan eksternal serta kolaborasi antar kampus agar efektivitas penanganan kasus kekerasan semakin kuat dan sesuai regulasi nasional.

Satgas PPKPT UKI



Gambar 2: Logo Satgas PPKPT UKI

Satgas PPKPT Universitas Kristen Indonesia (UKI) resmi dibentuk pada tahun 2023 sebagai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, meskipun regulasi awal telah ditetapkan melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta diperkuat dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Struktur organisasi awal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Divisi Intervensi, Divisi Advokasi dan Hukum, serta Divisi Humas dan Riset, yang kemudian diperbarui dengan penambahan Divisi Riset dan Divisi Data untuk memperkuat basis informasi dan dokumentasi. Dalam praktiknya, Satgas UKI menekankan prinsip korban-sentris dengan melibatkan dosen, advokat, psikolog, dan Ketua Satgas sesuai persetujuan korban, terutama pada kasus kekerasan seksual yang sensitif terhadap gender dan relasi kuasa. Strategi sosialisasi lebih mengutamakan roadshow ke fakultas, organisasi kemahasiswaan, tenaga kependidikan, dan pimpinan kampus, sementara media sosial hanya digunakan sebagai sarana pendukung. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran, memperkuat pemahaman, serta memastikan keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian berjudul “Komunikasi Antar Organisasi dalam *Resource Sharing* Satgas PPKPT pada Penanganan Kasus Kekerasan: Studi AKMRTV Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia” peneliti melibatkan enam informan diantaranya, Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta yaitu Ketua, Sekretaris, dan Koresponden. Kemudian Satgas UKI yaitu Ketua dan Psikolog. Dan terdapat satu orang mahasiswa korban kekerasan dari AKMRTV Jakarta yang mendapat pendampingan langsung melalui kolaborasi lintas kampus. Penelitian ini juga didukung dengan observasi terhadap aktivitas Satgas serta dokumentasi kegiatan yang relevan.

Dari proses tersebut, peneliti berhasil menggali beberapa aspek penting terkait praktik *resource sharing* antar Satgas PPKPT yang diantaranya:

1. Percepatan Penanganan Kasus Melalui Koordinasi Lintas Kampus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik resource sharing antar Satgas PPKPT di AKMRTV Jakarta dan UKI memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat proses penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi. Kolaborasi lintas kampus menghadirkan dukungan tenaga ahli, pertukaran informasi, serta koordinasi kelembagaan yang memperkuat kapasitas Satgas. Proses ini tidak hanya mempercepat penanganan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi, memperluas pengetahuan anggota, serta memperkaya pendekatan psikologis terhadap korban. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Social Exchange Theory yang menekankan bahwa interaksi sosial berlangsung dalam kondisi saling ketergantungan, di mana pihak-pihak menilai hubungan berdasarkan imbalan dan biaya (Thibaut & Kelley, 2017). Dalam konteks Satgas, pengorbanan waktu dan tenaga dianggap sepadan dengan manfaat berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pendampingan korban.

Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan tenaga ahli dari kampus mitra memungkinkan proses pendampingan korban dilakukan secara lebih sensitif, tepat, dan berperspektif psikologis. Hal ini memperkuat kepercayaan korban terhadap keseriusan Satgas, sekaligus membantu pemulihan kondisi mental dan emosional mereka. Dari perspektif kelembagaan, kerja sama ini memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan meningkatkan kapasitas tambahan dalam menangani kasus yang kompleks.

2. Efektivitas Berbagi Tenaga Ahli dalam Meningkatkan Kualitas Pendampingan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga ahli lintas kampus, khususnya psikolog dan konselor, merupakan bentuk resource sharing yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendampingan korban kekerasan di perguruan tinggi. Kehadiran tenaga ahli dari UKI memperkuat aspek psikologis dan hukum, sehingga efektivitas penanganan kasus meningkat secara nyata dibandingkan sebelum adanya kerja sama. Pendampingan menjadi lebih profesional, terarah, dan berperspektif korban, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan korban terhadap keseriusan Satgas.

Selain memberikan manfaat langsung bagi korban, kerjasama ini juga memperluas wawasan bagi ke-2 Satgas mengenai ragam bentuk kekerasan seksual serta strategi penanganannya. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Satgas tidak perlu memulai dari nol, melainkan dapat belajar dari pengalaman kampus lain, sehingga efisiensi kerja meningkat dan kualitas pendampingan korban lebih terjamin. Dengan demikian, berbagi tenaga ahli menjadi salah satu bentuk resource sharing paling strategis dalam meningkatkan kualitas pendampingan korban, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan Satgas dalam menghadapi kasus yang kompleks.

3. Pertukaran Informasi dan SOP Sebagai Penguat Koordinasi Penanganan Kasus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran informasi dan penyelarasan SOP antar Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta dan UKI menjadi faktor penting dalam memperkuat koordinasi penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi. Melalui mekanisme ini, Satgas memperoleh masukan hukum dan psikologis yang relevan, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai dinamika kasus di masing-masing kampus. Pertukaran informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi data, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama yang membantu menyamakan langkah penanganan kasus.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kampus memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan lebih matang, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi organisasi yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi antar unit untuk efektivitas kerja. Diskusi lintas kampus juga membantu menyamakan pemahaman mengenai prosedur pendampingan korban, batasan etis, serta perlindungan kerahasiaan, sehingga penanganan kasus berjalan lebih konsisten dan aman. Penyelarasan SOP menjadi fondasi penting dalam menjaga standar etis dan konsistensi penanganan kasus. Dengan adanya kesepahaman prosedur, Satgas dapat memastikan korban terlindungi, informasi sensitif tetap terjaga, dan langkah penanganan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa koordinasi antar lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan.

4. Pola Komunikasi antar Organisasi Satgas PPKPT dalam Praktik *Resource Sharing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *resource sharing* antara Satgas PPKPT AKMRTV Jakarta dan UKI tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis berbagi tenaga ahli dan fasilitas, tetapi juga oleh pola komunikasi yang terjalin antar lembaga. Komunikasi formal melalui rapat koordinasi, surat resmi, dan penyusunan SOP bersama berfungsi untuk memastikan legitimasi kerja sama dan keseragaman prosedur. Sementara itu, komunikasi informal melalui percakapan personal, diskusi non-formal, dan media digital seperti WhatsApp Group mempercepat pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi.

Analisis data memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi menjadi landasan utama komunikasi yang efektif. Pertukaran informasi melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal, memungkinkan Satgas memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi korban, termasuk aspek psikologis dan kebutuhan hukum. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi organisasi oleh Mumby (2013) yang menekankan komunikasi sebagai proses sentral dalam membangun koordinasi dan legitimasi organisasi. Interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi intensif antar

Satgas berperan penting dalam mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat kepercayaan, serta memastikan korban memperoleh perlindungan yang konsisten. Komunikasi digital melalui WhatsApp Group dan Zoom terbukti mampu menyatukan keahlian lintas bidang, membuat koordinasi lebih fleksibel, serta mendukung pendampingan korban secara berperspektif psikologis. Meski terdapat hambatan teknis seperti perbedaan SOP atau jadwal antar kampus, komunikasi rutin dan evaluasi bersama menjadi solusi adaptif untuk menyamakan persepsi dan menjaga konsistensi pendampingan.

5. Kepercayaan Sebagai Fondasi Keberlanjutan Resource Sharing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antar Satgas PPKPT menjadi faktor utama dalam keberlanjutan praktik *resource sharing*. Kepercayaan memungkinkan keterbukaan dalam berbagi informasi, pengalaman, dan tenaga ahli, serta menjamin kerahasiaan data sensitif yang berkaitan dengan korban maupun pelaku. Tanpa adanya rasa saling percaya, kerja sama lintas kampus akan sulit berjalan secara efektif karena pertukaran informasi yang dilakukan menyangkut aspek psikologis, hukum, dan etika yang sangat krusial.

Analisis data memperlihatkan bahwa kepercayaan tumbuh dari komunikasi yang jujur, konsisten, dan komitmen bersama dalam menangani kasus kekerasan. Kepercayaan ini membuat koordinasi lebih lancar, proses berbagi sumber daya lebih terbuka, dan pendampingan korban lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan Social Exchange Theory, yang menekankan bahwa hubungan sosial dan kerja sama akan berkelanjutan apabila terdapat timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan menjadi mekanisme penting yang memungkinkan keterbukaan informasi, berbagi tenaga ahli, serta koordinasi yang konsisten. Interpretasi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai penguat koordinasi, tetapi juga sebagai fondasi keberlanjutan kerja sama. Dengan adanya rasa saling percaya, Satgas dapat memperluas kolaborasi ke bidang lain seperti sosialisasi, edukasi, dan pencegahan kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik *resource sharing* antar Satgas PPKPT, khususnya antara AKMRTV Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia, merupakan strategi kelembagaan yang efektif dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi. Berbagi tenaga ahli, informasi, SOP, dan fasilitas pendukung terbukti mampu mengatasi keterbatasan sumber daya internal serta meningkatkan kualitas layanan pendampingan korban. Efektivitas kerja sama terlihat dari kolaborasi lintas kampus dalam menyediakan konselor, psikolog, maupun tenaga hukum yang tidak tersedia secara penuh di satu institusi. Kepercayaan dan prinsip timbal balik menjadi penentu keberlanjutan kerja sama, karena hubungan sosial yang kuat antar anggota Satgas

membuat proses berbagi sumber daya berjalan lebih lancar dan solidaritas kelembagaan semakin kokoh. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan, dan hambatan komunikasi, penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen bersama, komunikasi terbuka, serta kesediaan berbagi secara adil mampu meminimalisasi hambatan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan *resource sharing* Satgas PPKPT ditentukan oleh kombinasi komunikasi organisasi yang efektif, ikatan sosial yang kuat, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

Saran Akademis

Secara akademis, mahasiswa AKMRTV Jakarta dan UKI diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan Satgas PPKPT, baik melalui sosialisasi maupun pendampingan sebaya, untuk memperkuat budaya kampus yang aman dan inklusif serta meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pencegahan kekerasan. Mahasiswa juga perlu menjaga etika komunikasi, baik tatap muka maupun digital, agar tercipta lingkungan komunikasi yang sehat dan mendukung keberhasilan program Satgas. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas ke lebih banyak perguruan tinggi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *resource sharing*, dengan menambahkan variabel lain seperti dampak psikologis terhadap korban atau efektivitas teknologi komunikasi digital dalam koordinasi antar-Satgas, serta menggunakan metode Penelitian Kuantitatif agar analisis lebih mendalam dan komprehensif.

Saran Praktis

Secara praktis, institusi pendidikan AKMRTV Jakarta dan UKI disarankan memperkuat dukungan kelembagaan terhadap Satgas PPKPT melalui penyediaan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung, serta mengadakan pelatihan rutin bagi anggota Satgas agar kompetensi mereka dalam menangani kasus kekerasan semakin meningkat. Institusi juga dapat mengembangkan forum kolaborasi lintas kampus untuk memperluas praktik *resource sharing*, sehingga koordinasi antar-Satgas lebih sistematis dan berkelanjutan.

REFERENSI

Al-Fajri, D. S. (2024). *Tren Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Naik dalam 4 Tahun Terakhir*. <https://Goodstats.Id>. <https://goodstats.id/article/empat-tahun-terakhir-tren-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-meningkat-sKkNo>

- Andini, R., & Salim, T. A. (2024). Penerapan Knowledge Sharing pada Sektor Publik Perspektif Bibliometrik. *Media Pustakawan*, 31(1), 60–72. <https://doi.org/10.37014/medpus.v31i1.5178>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Forsyth, D. R. (2010). *Group dynamics* (5th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Ilham, I., & Suhendra, S. (2022). *Teori organisasi*. Widina Bhakti Persada.
- KemenPPPA. (2025). *Ringkasan data kekerasan berdasarkan Simfoni PPA*. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id>.
- Mumby, D. K. (2013). *Organizational communication: A critical approach*. SAGE Publications.
- Olubiyo, P. O., & Olubiyo, L. M. (2023). Resource sharing services and information networking in academic libraries in Africa. *International Journal of Academic Library and Information Science*, 11(1), 5–10.
- Pratiwi, A. (2018). *Internet Belum Maksimal Digunakan untuk Kegiatan Produktif*. [Www.Kompas.Id](https://www.kompas.id). <https://www.kompas.id/artikel/internet-belum-maksimal-digunakan-untuk-kegiatan-produktif>
- Ritonga, E. Y. (2023). *Komunikasi organisasi*. Merdeka Kreasi Group.
- Sugianti, S. (2023). *Analisis resource sharing dalam jaringan perpustakaan: Studi kasus di FPPTI Wilayah Jawa Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (2017). *The Social Psychology of Groups*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315135007>
- Veronica, A. (2019). Resource Sharing: Perspektif Perpustakaan Universitas Esa Unggul. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a7>